



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI RIAU



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

PENGADILAN TINGGI RIAU

LAPORAN 2023 KINERJA



PENGADILAN TINGGI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO.315 PEKANBARU – RIAU 28131
TELP. (0761) 33768 – FAX. 0761 21523



PENGADILAN TINGGI RIAU



PT-RIAU.CO.ID



+62853-5800-0101

VISI

MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI RIAU YANG AGUNG

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN TINGGI RIAU
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PARA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DI PENGADILAN TINGGI RIAU
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN TINGGI RIAU

NILAI – NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS
3. KEJUJURAN
4. AKUNTABILITAS
5. RESPONSIBILITAS
6. KETERBUKAAN
7. KETIDAK BERPIHAKAN
8. PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM

NILAI – NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA

BERAKHLAK, MERUPAKAN AKRONIM DARI “BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF ”

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KINERJA PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023



Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan sebagai unit kerja penerapan Zona Integritas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum., menerima penghargaan sebagai Role Model pada Pengadilan Tinggi yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Pengadilan Tinggi Riau memperoleh Peringkat III Lomba Layanan Pengadilan PTSP Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Umum.



Pengadilan Tinggi Riau memperoleh Peringkat Terbaik I atas pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022.



Ketua Pengadilan Tinggi Riau memperoleh penghargaan atas peran aktif mendukung keberhasilan tugas Kepolisian dalam Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Provinsi Riau.



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Jon Efreddi, S.H., M.H., memperoleh apresiasi atas kontribusi dan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya.



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Dr. H. Prayitno Iman S, S.H., M.H., memperoleh apresiasi atas kontribusi dan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya.



Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Tjatur Wahjoe B.S.P, S.H., M.Hum., memperoleh penghargaan Terbaik II sebagai Role Model Panitera pada Pengadilan Tinggi.



Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Pagu di bawah 10 Miliar Semester I Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja Penyampaian SPM Gaji Induk Tercepat Pertama Semester I Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Pagu di bawah 10 Miliar Periode Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja Penyampaian SPM Gaji Induk Tercepat Pertama Periode Semester II Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.



PENGADILAN TINGGI RIAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, 2 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

The signature of Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum is written in blue ink over a circular stamp. The stamp is the official seal of the Pengadilan Tinggi Riau, featuring a central emblem and the text "PENGADILAN TINGGI RIAU" around the border.

Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 - 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Kinerja Pengadilan Tinggi Riau diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum mencapai target, namun beberapa indikator dapat melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Tinggi Riau beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri di bawahnya, masyarakat, dan *stakeholder* yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau.

Pekanbaru, 1 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

The block contains the official stamp of the Riau High Court and a handwritten signature in blue ink. The stamp is circular with the text 'PENGADILAN TINGGI RIAU' around the perimeter and a central emblem. The signature is written over the stamp and extends to the right.

Dr. H. Siswandiyono, S.H., M.Hum.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

<i>Latar Belakang</i>	2
<i>Tugas Pokok dan Fungsi</i>	2
<i>Struktur Organisasi</i>	2
<i>Isu Strategis</i>	4
<i>Sistematika Penyajian</i>	6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

<i>Rencana Strategis 2020-2024</i>	9
<i>Rencana Kinerja Tahun 2023</i>	13
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2023</i>	13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	15
<i>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</i>	18
<i>Realisasi Anggaran</i>	31

BAB IV

PENUTUP

<i>Kesimpulan</i>	37
<i>Rekomendasi</i>	37

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023	vi
Tabel 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi.....	3
Tabel 3. Uraian Tugas Struktur Organisasi	4
Tabel 4. Isu Strategis dan kebijakan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023	5
Tabel 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	12
Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 8. Capaian Kinerja Organisasi	15
Tabel 9. Perbandingan Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan.....	16
Tabel 10. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023.....	17
Tabel 11. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023	19
Tabel 12. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s.d 2023	19
Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023	20
Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023.....	20
Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023.....	21
Tabel 16. Persentase Penyelesaian Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 s.d 2023	22
Tabel 17. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2023.....	23
Tabel 18. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023	23
Tabel 19. Capaian indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 s.d tahun 2023	24
Tabel 20. Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023	27
Tabel 21. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	27
Tabel 22. Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023	28
Tabel 23. Persentase Salinan Putusan Pidana yang diKirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019-2023	29
Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	29
Tabel 25. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 -2023.....	30
Tabel 26. Realisasi DIPA 01 Tahun 2023.....	30
Tabel 27. Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d Tahun 2023.....	30
Tabel 28. Realisasi DIPA 03.....	30
Tabel 29. Realisasi DIPA 01 mendukung capaian Sasaran Strategis 1.....	30
Tabel 30. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1 – Indikator 5	30
Tabel 31. Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2	30
Tabel 32. Biaya Proses Tahun 2023 mendukung Sasaran Strategis 2	30
Tabel 33. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2	30

Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu	19
Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023.....	20
Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus.....	21
Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2019 -2023	23
Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023.....	27
Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023.....	28
Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023	30
Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA (01)	30
Grafik 9. Realisasi Anggaran DIPA (03)	30

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau	3
Gambar 2. Aplikasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau	6
Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan	9
Gambar 4. Framework	11
Gambar 5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip	18
Gambar 6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan aplikasi Evakip	20
Gambar 7. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip	21
Gambar 8. Capaian Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Evakip ..	22
Gambar 9. Nilai Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan aplikasi Survey	24
Gambar 10. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, pada aplikasi Evakip	26
Gambar 11. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, pada aplikasi Evakip	28
Gambar 12. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu pada aplikasi Evakip	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja 2 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja yang targetnya harus dicapai, dan dari hasil pengukuran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja diatas 100% sebanyak 4 indikator, dan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 4 Indikator.
2. Capaian Sasaran Strategis I “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tahun 2022 sebesar 103%, sedangkan tahun 2023 sebesar 103,4%.
3. Capaian Sasaran Strategis II “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

4. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Capaian tahun 2022 sebesar 101% dan tahun 2023 meningkat menjadi 101,7%.
5. Kinerja keuangan Pengadilan Tinggi Riau menunjukkan realisasi DIPA 01 sebesar 99,92% dan realisasi DIPA 03 sebesar 100%.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100% dan mampu meningkatkan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Rincian capaian masing-masing target indikator kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	42,5%	106,3%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,2%	102,2%
Capaian Sasaran Strategis I					103,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Strategis II					100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II					101,7%

* Sumber data tahun 2023 dari aplikasi Evakip, alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**
- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- **STRUKTUR ORGANISASI**
- **ISU STRATEGIS**
- **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Riau berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983. Awalnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan setelah diresmikannya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2022, maka 4 (empat) Pengadilan Negeri di Kepulauan Riau menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Provinsi Riau, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
3. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
5. Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB
7. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
8. Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II
9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II
10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II
11. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Riau secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tabel 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi

TUGAS PENGADILAN TINGGI		FUNGSI PENGADILAN TINGGI	
	Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.		Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.		Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarah di wilayah hukumnya, menanekut teknis vustisial. administrasi peradilan, administrasi umum. perlengkapan. keuangan. kepegawaian dan pembangunan.
	Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.		Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim. peiabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pe laksanaan administrasi perkara & administrasi umum.
			Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
			Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



Tabel 3. Uraian Tugas Struktur Organisasi

URAIAN TUGAS		
KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya		
PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.	
PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata		
PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	PRANATA KOMPUTER bertugas merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. ANALIS KEPEGAWAIAN bertugas melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN bertugas melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi. PRANATA KEUANGAN APBN bertugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan; pelaksanaan perintah pembayaran; kebendaharaan; pengelolaan administrasi belanja pegawai; dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi. ARSIPARIS bertugas mengurus dokumen, mulai dari dokumen tersebut bernilai aktif, digunakan hingga bernilai musnah atau disimpan menjadi arsip statis.

ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Riau secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah provinsi Riau.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2023, Pengadilan Tinggi Riau telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparaturnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau memperhatikan isu strategis sebagai berikut :

Tabel 4. Isu Strategis dan kebijakan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

Isu Strategis	Kebijakan
1. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	• Optimalisasi penyelesaian perkara dan efektifitas pengelolaan penyelesaian sesuai SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badan melalui SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022. • Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara. • Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara dan efektifitas pengelolaan penyelesaian melalui pengawasan berkala dan rapat bulanan. • Peningkatan kompetensi Hakim dan ASN dalam penyelesaian perkara melalui rapat bulanan dan pembinaan berkala.
2. Peningkatan pelayanan publik.	• Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik yang berbasis pada teknologi informasi secara terintegrasi melalui aplikasi SMART PTSP, memuat 13 (sebelas) jenis layanan yaitu : Virtual PTSP, Tunku Online (Bantuan Hukum Online), Info Perkara Banding, Info Perkara BHT, Layanan Chatbot Data Perkara, Penyempahan Advokat, Izin Riset & Kerja Praktik, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat & IPK, Data Statistik, Live Chat PTSP, Live Streaming PTSP. • Optimalisasi kualitas sumber daya manusia pelayanan publik melalui pembinaan, briefing, dan training. • Optimalisasi sarana prasana pelayanan publik termasuk sarana disabilitas. • Optimalisasi Standar Pelayanan Publik. • Pengawasan dan monev pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.
4. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	• Peningkatan kualitas pengawasan. • Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. • Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi perencanaan kinerja “e-Performance”, aplikasi pengukuran kinerja “Evakip”, aplikasi evaluasi kinerja “Semakin”, dan aplikasi informasi kinerja e-Sakip. • Melaksanakan monev akuntabilitas kinerja berkala.
5. Penguatan integritas	Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pada tahun 2023 berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau melakukan optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi informasi melalui aplikasi yang dapat diakses secara online pada link <https://e-sakip.pt-riau.go.id/>. Aplikasi ini mengakomodir seluruh tahap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi. Fitur-fitur yang disediakan aplikasi ini terdiri dari :

1. Perencanaan, memberikan informasi perencanaan meliputi : Renstra, RKT, Renja dan Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

2. Pengukuran, mengukur capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sesuai target kinerja yang ditetapkan melalui fitur "Evakip".
3. Pelaporan, menyajikan laporan kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri dibawahnya.
4. Evaluasi, menyediakan informasi hasil evaluasi dan lembar kerja evaluasi kinerja melalui fitur "Semakin" sesuai Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya.

Gambar 2. Aplikasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau

The image displays the E-Sakip application interface for the Riau High Court. The main dashboard includes sections for 'Tentang E-Sakip' (About E-Sakip) and 'Perencanaan Kinerja' (Performance Planning). The 'Perencanaan Kinerja' section shows a table of performance planning data for 2023, including 'Pengadilan Tinggi Riau' and 'Pengadilan Negeri Pekanbaru'. The 'Pelaporan Kinerja' (Performance Reporting) section shows a table of performance reporting data for 2023, including 'Pengadilan Tinggi Riau', 'Pengadilan Negeri Pekanbaru', 'Pengadilan Negeri Dumai', and 'Pengadilan Negeri Bangkinang'. The 'Pengukuran Kinerja' (Performance Measurement) section shows a table of performance measurement data for 2023, including 'Pengadilan Tinggi Riau' and 'Pengadilan Negeri Pekanbaru'. The 'Evaluasi' (Evaluation) section shows a table of evaluation data for 2023, including 'Pengadilan Tinggi Riau' and 'Pengadilan Negeri Pekanbaru'.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Riau menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung

RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan



VISI

Visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Riau untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Riau sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Riau, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Riau, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Riau.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :
 - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - e. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Riau menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Riau menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program: Dukungan manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- b. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan : Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Gambar 4. Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau



Tabel 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
					2020	2021	2022	2023	2024					
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	1. Meningkatnya kepercayaan publik atas pelayanan pengadilan tinggi riau	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%	Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	120.000.000.000
		93%		2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%					
		97%		3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%					
		44%		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%					
		93%		5. Index persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap <i>layanan</i> Pengadilan	87%	88%	95%	96%	97%					
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5000 perkara	1.800.000.000
		100%		2. Persentase Salinan Putusan Pidana Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	25.808.489.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	177.812.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	235.514.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN**
- **KINERJA REALISASI ANGGARAN**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena :

1. Rata-rata capaian sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,7%. Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan

sebesar 103,4%, dan untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 100%.

2. Seluruh target indikator kinerja berhasil memperoleh capaian $\geq 100\%$

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tabel 8. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	42,5%	106,3%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,2%	102,2%
Capaian Sasaran Strategis I					103,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Strategis II					100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II					101,7%

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN CAPAIAN NASIONAL

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau mendekati capaian kinerja secara nasional seluruh Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum pada tahun 2023, dengan data sebagai berikut :

1. Rata-rata target kinerja Pengadilan Tinggi Riau lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional. Target Kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebesar 92,8%, sedangkan target kinerja nasional sebesar 91,9%.
2. Rata-rata realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional. Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebesar 94,1%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 93,8%.
3. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebesar 101,7% mendekati capaian kinerja nasional sebesar 103,1%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan target kinerja dan realisasi kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, Pengadilan Tinggi Riau mampu memperoleh capaian kinerja mendekati capaian kinerja nasional.

Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbandingan Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023			Capaian Nasional Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badilum Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100,0%	104,2%	97,2%	99,0%	101,9%
		2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100,0%	104,2%	97,6%	99,3%	101,9%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100,0%	100,0%	97,6%	99,1%	101,6%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	42,5%	106,3%	43,7%	47,9%	114,4%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,2%	102,2%	91,9%	97,1%	105,8%
		Capaian Sasaran Strategis I	85,6%	88,1%	103,4%	85,6%	88,5%	105,1%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100,0%	100,0%	97,8%	98,3%	100,8%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100,0%	100,0%	98,3%	99,9%	101,7%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100,0%	100,0%	98,5%	99,0%	100,6%
		Capaian Sasaran Strategis I	100%	100,0%	100,0%	98,2%	99,1%	101,1%
		Rata-rata Sasaran Strategis I dan II	92,8%	94,1%	101,7%	91,9%	93,8%	103,1%

Tabel 10. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023

No	Satuan Kerja	KATEGORI PENGADILAN	Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel																Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												Rata-rata Capaian Strategis							
			Indikator Kinerja																Indikator Kinerja																			
			Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Sasaran Strategis I	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu							Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						Capaian Sasaran Strategis II
																			Indikator Kinerja																			
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
01	PT Banda Aceh	301-1000 Perkara	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	40	51,42	128,55%	90	94,38	104,87%	107,9%	99	100	101,01%	99	100	101,01%	99	100	101,01%	101,0%	104,5%									
02	PT Mataram	301-1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	38	38,51	101,34%	94	94,39	100,41%	100,4%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,2%									
03	PT Denpasar	301-1000 Perkara	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	95	99,8	105,05%	40	42,00	105,00%	90	98,67	109,63%	106,0%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	103,0%									
04	PT Riau	301-1000 Perkara	96	100	104,17%	96	100	104,17%	100	100	100,00%	40	42,50	106,25%	96	98,15	102,24%	103,4%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,7%									
05	PT Jambi	301-1000 Perkara	96	100	104,17%	98	100	102,04%	96	100	104,17%	40	37,82	94,55%	93	100,00	107,53%	102,5%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,2%									
06	PT Banjarmasin	301-1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	40	41,10	102,75%	90	98,56	109,51%	102,5%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,2%									
07	PT Yogyakarta	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	40	44,96	112,40%	95	98,02	103,18%	103,1%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,6%									
08	PT Ambon	< 300 Perkara	95	98	103,16%	95	98	103,16%	95	98	103,16%	35	37,00	105,71%	95	100,00	105,26%	104,1%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	102,0%									
09	PT Banten	301-1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	51	49,00	96,08%	90,5	93,92	103,78%	100,0%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,0%									
10	PT Bangka Belitung	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	58,90	117,80%	90	96,19	106,88%	104,9%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	102,5%									
11	PT Bengkulu	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	30	30,18	100,60%	96	96,25	100,26%	100,2%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,1%									
12	PT Bandung	> 1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	33,75	39,29	116,41%	90	99,00	110,00%	105,3%	96	99,31	103,45%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	103,9%	104,6%									
13	PT Makassar	> 1000 Perkara	100	94,42	94,42%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	52	55,21	106,17%	90	97,11	107,90%	101,7%	98	54,35	55,46%	98	98,02	100,02%	98	78,26	79,86%	78,4%	90,1%									
14	PT Surabaya	> 1000 Perkara	95	99,7	104,95%	95	99,69	104,94%	95	100	105,26%	50	58,09	116,18%	93	97,59	104,94%	107,3%	97	99,88	102,97%	97	99,12	102,19%	97	100	103,09%	102,7%	105,0%									
15	PT Manado	301-1000 Perkara	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	35	90,29	257,97%	90	93,79	104,21%	135,6%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	117,8%									
16	PT Semarang	> 1000 Perkara	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	50	51,57	103,14%	95	99,77	105,02%	104,8%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	105,3%	105,0%									
17	PT Papua Barat	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	51,26	102,52%	92	93,63	101,77%	100,9%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,4%									
18	PT Medan	> 1000 Perkara	84	93	110,71%	94	95	101,06%	95	91	95,79%	37	71,00	191,89%	98	97,84	99,84%	119,9%	98	100	102,04%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	103,5%	111,7%									
19	PT Palangkaraya	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	22	22,34	101,55%	93	97,00	104,30%	101,2%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,6%									
20	PT Tanjung Karang	301-1000 Perkara	93	100	107,53%	93	100	107,53%	93	100	107,53%	60	63,05	105,08%	90	95,00	105,56%	106,6%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	103,3%									
21	PT Jayapura	< 300 Perkara	96	100	104,17%	96	99,25	103,39%	96	100	104,17%	35	64,81	185,17%	92	95,72	104,04%	120,2%	95	100	105,26%	96	100	104,17%	96	100	104,17%	104,5%	112,4%									
22	PT Kepulauan Riau	< 300 Perkara	95	86,27	90,81%	95	86,89	91,46%	95	90	94,74%	25	30,63	122,52%	85	88,33	103,92%	100,7%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	100,3%									
23	PT Kalimantan Utara	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	90	56,41	62,68%	95	96,56	101,64%	92,9%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	96,4%									
24	PT Kalimantan Timur	301-1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	34	35,00	102,94%	85	96,87	113,96%	103,4%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,7%									
25	PT Pontianak	301-1000 Perkara	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	60	33,92	56,53%	93	104,86	112,75%	97,0%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	98,5%									
26	PT Maluku Utara	301-1000 Perkara	98	100	102,04%	98	100	102,04%	98	100	102,04%	37	37,30	100,81%	94	97,72	103,96%	102,2%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	101,1%									
27	PT Palembang	< 300 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	55	39,15	71,18%	92	99,37	108,01%	95,8%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	97,9%									
28	PT Kupang	301-1000 Perkara	100	95,98	95,98%	100	100	100,00%	100	92,86	92,86%	42	37,61	89,55%	90	99,31	110,34%	97,7%	90	95,98	106,64%	90	100	111,11%	90	92,86	103,18%	107,0%	102,4%									
29	PT Jakarta	> 1000 Perkara	95	99,71	104,96%	95	100	105,26%	95	100	105,26%	55	51,14	92,98%	90	96,25	106,94%	103,1%	75	97,61	130,15%	92	100	108,70%	95	98,46	103,64%	114,2%	108,6%									
30	PT Kendari	< 300 Perkara	90	100	111,11%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	30	49,45	164,83%	90	103,61	115,12%	122,7%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	90	100	111,11%	111,1%	116,9%									
31	PT Padang	301-1000 Perkara	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	50	76,18	152,36%	93	98,00	105,38%	111,5%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100	100	100,00%	100,0%	105,8%									
32	PT Sulawesi Barat	< 300 Perkara	99	100	101,01%	99	100	101,01%	98	100	102,04%	52	44,80	86,15%	90	92,63	102,92%	98,6%	98	100	102,04%	97	100	103,09%	99	100	101,01%	102,0%	100,3%									
Rata-rata			97,19	98,97	101,94%	97,56	99,33	101,88%	97,63	99,11	101,59%	43,71	47,87	114,36%	91,86	97,14	105,82%	105,1%	97,84	98,35	100,79%	98,31	99,91	101,72%	98,47	99,05	100,65%	101,1%	103,1%									

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Riau, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	104,2%
2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	96%	100%	104,2%
3. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	40%	42,5%	106,3%
5. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	96%	98,2%	102,2%
Rata-Rata Capaian Sasaran 1			103,4%

Sasaran 1 - Indikator kinerja 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

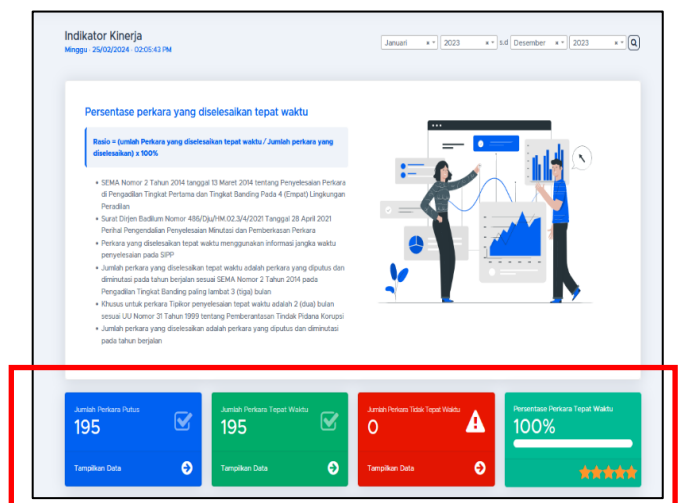
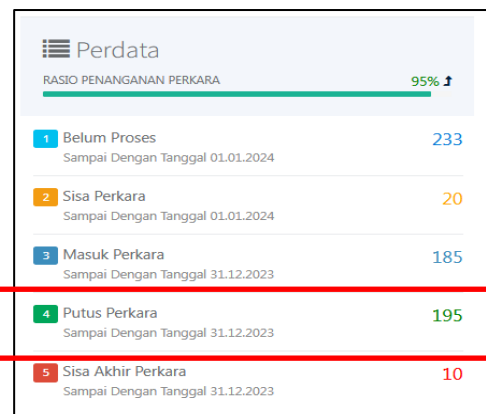
Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara perdata Pengadilan Tinggi Riau yang putus tahun 2023 sebanyak 195 perkara, dan berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip, seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan.

Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan melebihi target 96%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 104,2%.

Gambar 5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip



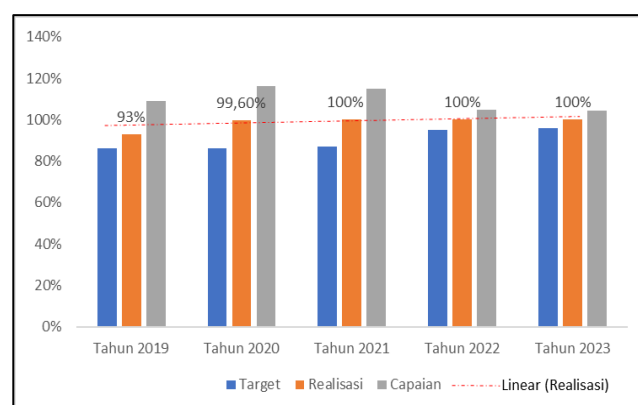
Tabel 11. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Th. 2023	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Th. 2023	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	16	16	100%
Februari	19	19	100%
Maret	20	20	100%
April	5	5	100%
Mei	13	13	100%
Juni	33	33	100%
Juli	15	15	100%
Agustus	15	15	100%
September	6	6	100%
Oktober	23	23	100%
November	20	20	100%
Desember	10	10	100%
Jumlah	195	195	100%

Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2023 sebesar 100% yang nilai realisasinya sama dengan tahun sebelumnya, namun capaian pada tahun 2023 sebesar 104,2% lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 105%, karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sesuai data di tabel, sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Tinggi Riau selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu dapat dipertahankan 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Riau selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara perdata.

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu Tahun 2019 s.d 2023



Tabel 12. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	195	195	96%	100%	104,2%
	2022	259	259	95%	100%	105%
	2021	256	256	87%	100%	115%
	2020	274	273	86%	99,6%	116%
	2019	318	296	86%	93%	109%

Sasaran 1 - Indikator kinerja 2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 104,2%.

Capaian indikator ini sangat baik karena dapat melebihi target. Realisasi penyelesaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah sebesar 100%, karena dari 730 perkara yang telah diselesaikan (baik perkara pidana biasa maupun pidana anak), keseluruhan perkara tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dalam kurun waktu tidak melebihi 3 (tiga bulan) sesuai Surat Edaran ketua Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014.

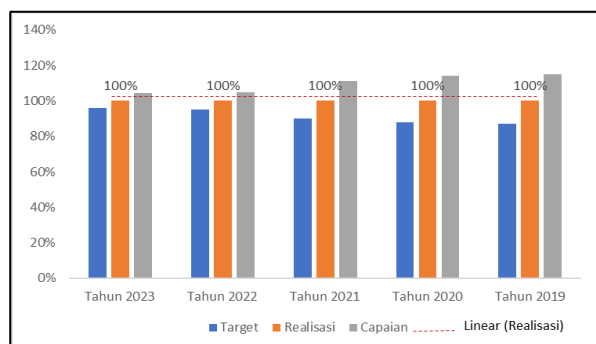
Tabel 13. Jumlah Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023

Bulan	Perkara Pidana Yang Putus Tahun 2023	Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu pada tahun 2023	Realisasi Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu (%)
Januari	70	70	100%
Februari	36	36	100%
Maret	48	48	100%
April	36	36	100%
Mei	72	72	100%
Juni	62	62	100%
Juli	78	78	100%
Agustus	72	72	100%
September	44	44	100%
Oktober	79	79	100%
November	76	76	100%
Desember	57	57	100%
Jumlah	730	730	100%

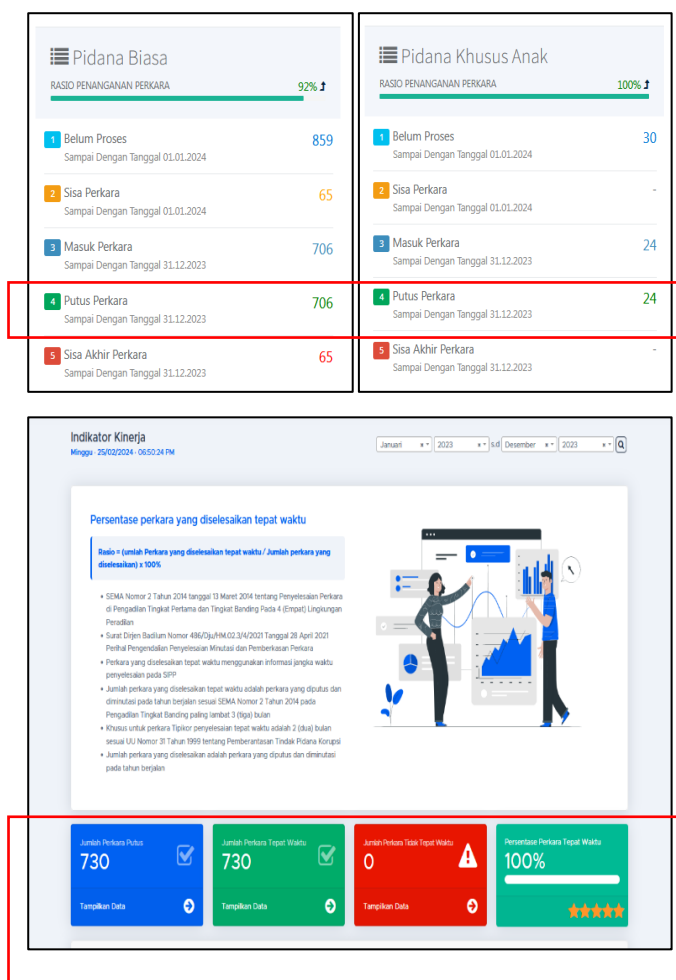
Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pidana Pengadilan Tinggi Riau yang putus tahun 2023 sebanyak 730 perkara (706 Pidana biasa dan 24 Pidana anak), dan berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip, seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan melebihi target 96%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 104,2%.

Berdasarkan data pada tabel dan srafik Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, capaian indikator ini sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 berturut turut adalah 115%, 114%, 111%, 105%, dan 104,2%. Capaian pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasi penyelesaian perkara pidana tepat waktu setiap tahun tetap dapat dipertahankan sebesar 100%.

Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023



Gambar 6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan aplikasi Evakip



Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara yang Pidana Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	730	730	96%	100%	104,2%
	2022	753	753	95%	100%	105%
	2021	717	717	90%	100%	111%
	2020	676	676	88%	100%	114%
	2019	600	600	87%	100%	115%

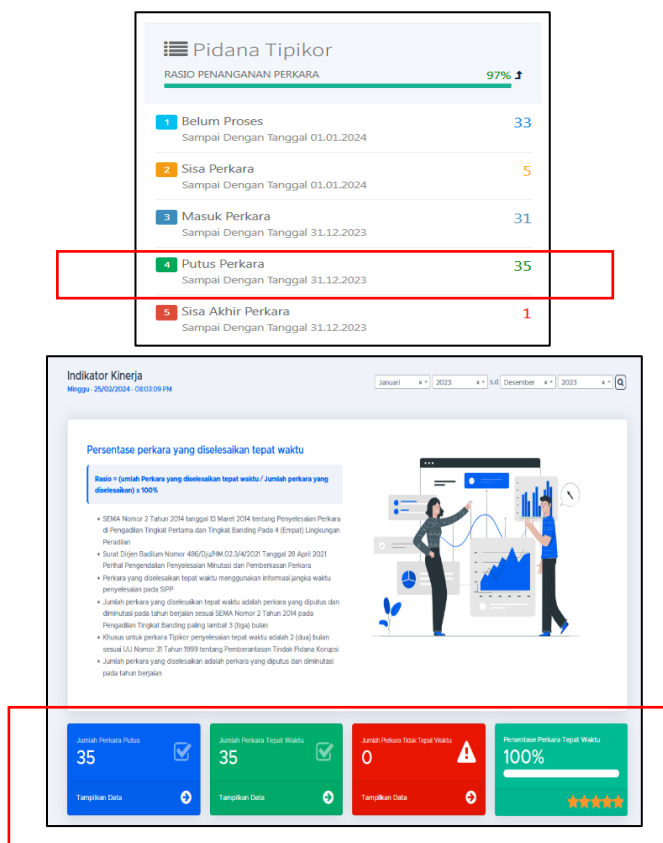
Sasaran 1 - Indikator kinerja 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara pidana khusus yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Riau adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian sebesar 100%. Dari jumlah 35 Perkara Pidana khusus tersebut, keseluruhannya Perkara Pidana Khusus dapat diselesaikan tidak melebihi waktu 60 hari, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Perhitungan penyelesaian perkara ini realisasi ini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIPP dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip.

Gambar 7. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip

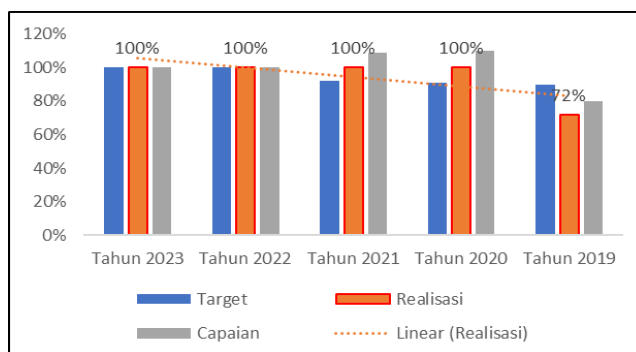


Tabel 15. Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Pada Tahun 2023	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu	Realisasi Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu (%)
Januari	5	5	-
Februari	3	3	100%
Maret	2	2	100%
April	1	1	100%
Mei	4	4	100%
Juni	1	1	100%
Juli	4	4	100%
Agustus	4	4	100%
September	2	2	100%
Oktober	1	1	100%
November	2	2	100%
Desember	6	6	100%
Jumlah	35	35	100%

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2023 berturut-turut adalah 80%, 110%, 109%, 100%, dan 100%. Pada tahun 2023, realisasi dan capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tetap mampu dipertahankan sebesar 100%. Keberhasilan penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu selalu mencapai 100% menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu.

Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu tahun 2019 s.d tahun 2023



Tabel 16. Persentase Penyelesaian Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana Diselesaikan Tahun 2023	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	2023	35	35	100%	100%	100%
	2022	33	33	100	100%	100%
	2021	38	38	92%	100%	109%
	2020	24	24	91%	100%	110%
	2019	25	18	90%	72%	80%

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara baik perkara Perdata, Pidana, maupun Pidana khusus pada tahun 2023 sehingga seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% ditunjang oleh factor-faktor sebagai berikut:

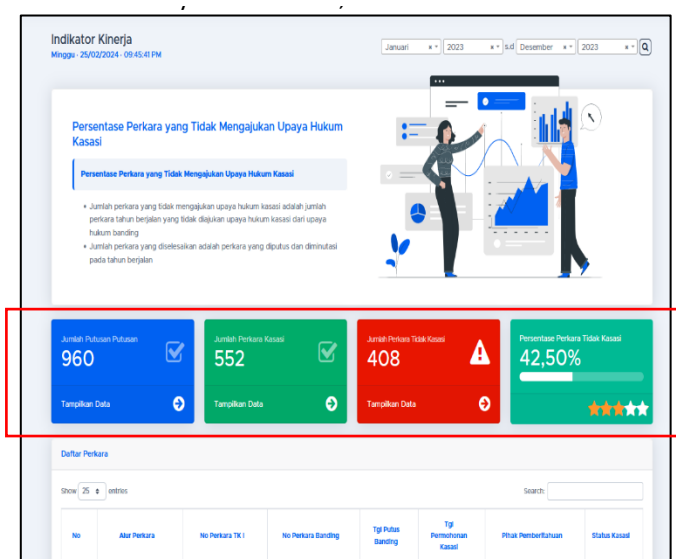
1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 60 (enam) puluh hari untuk perkara pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 3 bulan.
2. SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum melalui SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring Evakip, Rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
4. Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.
5. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, dan aparaturnya teknis dalam penyelesaian perkara.

Sasaran 1 - Indikator kinerja 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding.

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 42,5 %, karena dari 960 perkara yang diputus di tingkat banding pada tahun 2023, sebanyak 552 perkara mengajukan kasasi dan 408 perkara tidak mengajukan kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Realisasi ini

Gambar 8. Capaian Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Evakip



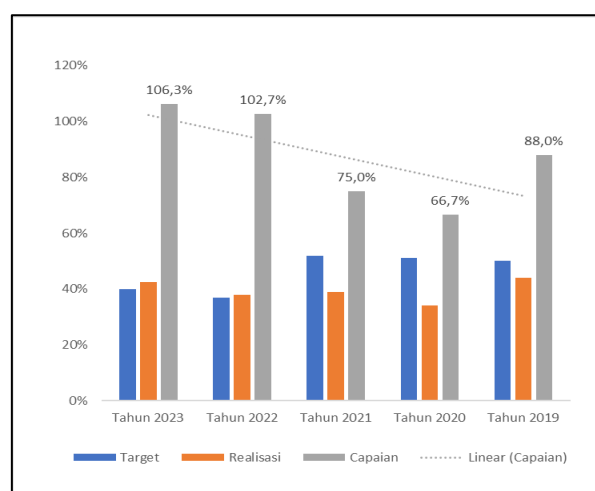
Tabel 17. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)
1	Januari	91	54	37	40,66%
2	Februari	58	34	24	41,38%
3	Maret	70	37	33	47,14%
4	April	42	24	18	42,86%
5	Mei	89	53	36	40,45%
6	Juni	96	70	26	27,08%
7	Juli	97	64	33	34,02%
8	Agustus	91	54	37	40,66%
9	September	52	18	34	65,38%
10	Oktober	103	68	35	33,98%
11	November	98	56	42	42,86%
12	Desember	73	20	53	72,60%
Jumlah		960	552	408	42,50%

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Pada tabel di bawah dan gambar grafik disamping, dijelaskan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Berturut turut capaian dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 88%, 67%, 76%, 104%, dan 106,3%. Selain itu realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 42,5% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 38%. Kondisi ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 meningkat, sehingga jumlah perkara yang mengajukan kasasi lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengajukan kasasi.

Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2019 -2023



Tabel 18. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tingkat Banding Tahun	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2023	960	552	408	40%	42,5%	106,3%
	2022	1045	644	401	37%	38%	104%
	2021	1012	614	397	52%	39%	76%
	2020	974	640	334	51%	34%	67%
	2019	943	531	412	50%	44%	88%

Salah satu faktor meningkatnya jumlah pencari keadilan mengajukan Kasasi dapat disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Pengadilan Tinggi Riau dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada

tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan *briefing* yang dilakukan aparatur teknis secara periodik. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan Tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Tinggi Riau.

Sasaran 1 - Indikator kinerja 5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar

98,2%. Realisasi tersebut melebihi target yang awalnya ditetapkan 96% sehingga memperoleh capaian sebesar 102,2%.

Gambar 9. Nilai Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan aplikasi Survey

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Umur
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN TINGGI PEKANBARU					
NILAI INDEKS 3,93 / 98,2 % Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023					
JUMLAH	39 RESPONDEN				
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 19 ORANG PEREMPUAN : 20 ORANG				
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG SD : 0 ORG SMP : 0 ORG SMU : 1 ORG Diploma 1 : 0 ORG				
PEKERJAAN	Diploma 2 : 0 ORG Diploma 3 : 0 ORG S1 : 32 ORG S2 : 6 ORG S3 : 0 ORG PNS : 19 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 0 ORG WIRUSAHA : 0 ORG TENAGA KONTRAK : 1 ORG LAINNYA : 17 ORG				

Tabel dibawah ini menunjukkan data peningkatan capaian kinerja indeks responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Index survey kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023 sebesar 98,2 %, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 95%. Kondisi ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Tinggi Riau semakin meningkat.

Tabel 19.Capaian indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 s.d tahun 2023

TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2019	1	Persyaratan	95,5	Sangat baik	95,5	86	111,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,3	Sangat baik	90,3	86	105,0%
	3	Waktu Penyelesaian	76,8	Sangat baik	76,8	86	89,3%
	4	Biaya/Tarif	79,5	Sangat Baik	79,5	86	92,4%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
	6	Kompetensi Pelaksana	93,3	Sangat baik	93,3	86	108,5%
	7	Perilaku Pelaksana	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	77,8	Sangat baik	77,8	86	90,5%
	9	Sarana dan Prasarana	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
Th. 2020	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2019 :				87,8	86	102,1%
	1	Persyaratan	94,0	Sangat baik	94,0	87	108,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,5	Sangat baik	93,5	87	107,5%
	3	Waktu Penyelesaian	85,8	Sangat baik	85,8	87	98,6%

Th. 2021	4	Biaya/Tarif	88,0	Sangat Baik	88,0	87	101,1%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,5	Sangat baik	90,5	87	104,0%
	6	Kompetensi Pelaksana	88,0	Sangat baik	88,0	87	101,1%
	7	Perilaku Pelaksana	88,8	Sangat baik	88,8	87	102,0%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	97,5	Sangat baik	97,5	87	112,1%
	9	Sarana dan Prasarana	87,0	Sangat baik	87,0	87	100,0%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2020 :				90,33	87	104%
	1	Persyaratan	98,8	Sangat baik	98,8	88	112,3%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	3	Waktu Penyelesaian	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	4	Biaya/Tarif	100,0	Sangat Baik	100,0	88	113,6%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	6	Kompetensi Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	7	Perilaku Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	100,0	Sangat baik	100,0	88a	113,6%
	9	Sarana dan Prasarana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021 :				99,87	88	113%
Th. 2022	1	Persyaratan	94,77	Sangat baik	94,77	95	99,76%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	95,92	Sangat baik	95,92	95	100%
	3	Waktu Penyelesaian	93,6	Sangat baik	93,6	95	98,52%
	4	Biaya/Tarif	96,5	Sangat Baik	96,5	95	98,44%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,92	Sangat baik	95,92	95	99,04%
	6	Kompetensi Pelaksana	94,17	Sangat baik	94,17	95	99,12%
	7	Perilaku Pelaksana	92,45	Sangat baik	92,45	95	97,31%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	93,35	Sangat baik	93,35	95	98,26%
	9	Sarana dan Prasarana	98,82	Sangat baik	98,82	95	104,02%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022 :				95,28	95	100%
Th. 2023	1	Persyaratan	98,77	Sangat baik	98,77	96	99,76%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	97,32	Sangat baik	97,32	96	100%
	3	Waktu Penyelesaian	98,9	Sangat baik	98,9	96	98,52%
	4	Biaya/Tarif	97,32	Sangat Baik	97,32	96	98,44%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	98,7	Sangat baik	98,7	96	99,04%
	6	Kompetensi Pelaksana	98,17	Sangat baik	98,17	96	99,12%
	7	Perilaku Pelaksana	98,8	Sangat baik	98,8	96	97,31%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	99,35	Sangat baik	99,35	96	98,26%
	9	Sarana dan Prasarana	96,05	Sangat baik	96,05	96	104,02%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2023 :				98,2	96	102,2%

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui Briefing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas,
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan SOP.
5. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti.
6. Pemberian reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik.



Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesai Perkarayang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara.

Indikator	Target	Sasaran	Capaian
1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran 2			100%

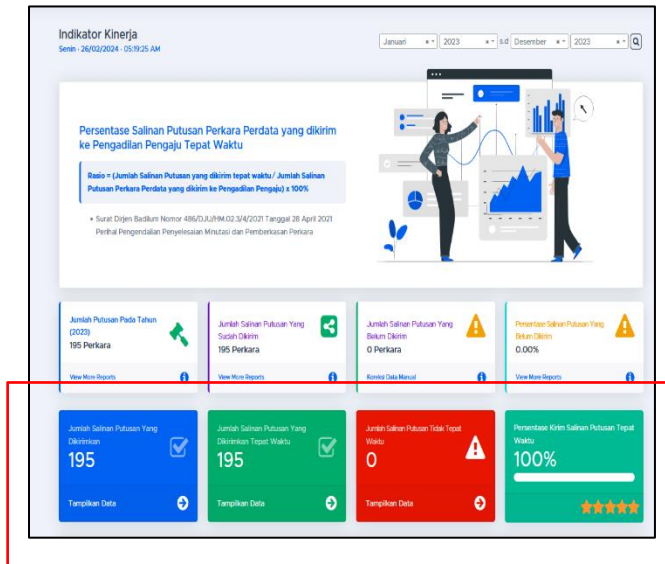
Sasaran 2 - Indikator kinerja 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Input adalah jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju, sedangkan outputnya adalah jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Pada tahun 2023 indikator ini mencapai target 100%, karena hampir seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahun 2022, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 195 perkara dan sebanyak 195 putusan perkara perdata dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Riau mengirim Salinan putusan ke Pengadilan pengaju melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan tanggal pengiriman salinan putusan diinputkan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan putusan dikirim ke

Gambar 10. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, pada aplikasi Evakip



Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman putusan perkara. Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan perkara perdata ke pengadilan pengaju tepat waktu selama tahun 2023.

Tabel 20. Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	16	16	0	100%
2	Februari	19	19	0	100%
3	Maret	20	20	0	100%
4	April	5	5	0	100%
5	Mei	13	13	0	100%
6	Juni	33	33	0	100%
7	Juli	15	15	0	100%
8	Agustus	15	15	0	100%
9	September	6	6	0	100%
10	Oktober	23	23	0	100%
11	November	20	20	0	100%
12	Desember	10	10	0	100%
Jumlah		195	195	0	100%

Dari data pada table di atas Pengiriman salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju pada tahun 2023 selalu tepat waktu. Kondisi ini telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, berturut-turut capaian kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%, 100%, 99,6%, 100% dan 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu selalu dipertahankan setiap tahun.

Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023



Tabel 21. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Ke pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim	2023	195	195	100%	100%	100%
	2022	259	259	100%	100%	100%
	2021	256	255	100%	99,6%	99,6%
Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu	2020	274	274	100%	100%	100%
	2019	244	244	100%	100%	100%

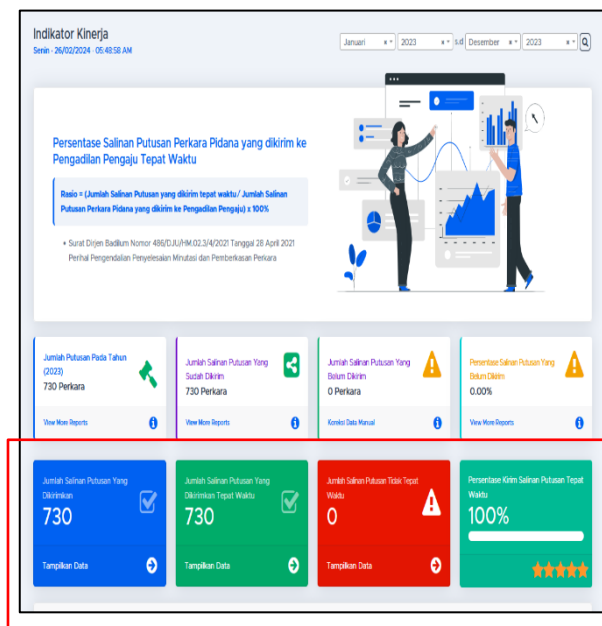
Sasaran 2 - Indikator 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. Pada tahun 2023 capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100%. Jumlah putusan perkara pidana (Pidana Biasa dan Pidana Anak) sebanyak 730 perkara, sebanyak 730 salinan putusan perkara Pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Seperti perkara Perdata, pengiriman salinan putusan perkara Pidana ke pengadilan pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pengiriman salinan putusan dicatat dengan valid pada aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Capaian indikator ini diukur melalui aplikasi Evakip. Pada Tahun 2023, seluruh salinan putusan perkara pidana dikirim tepat waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Gambar 11. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, pada aplikasi Evakip



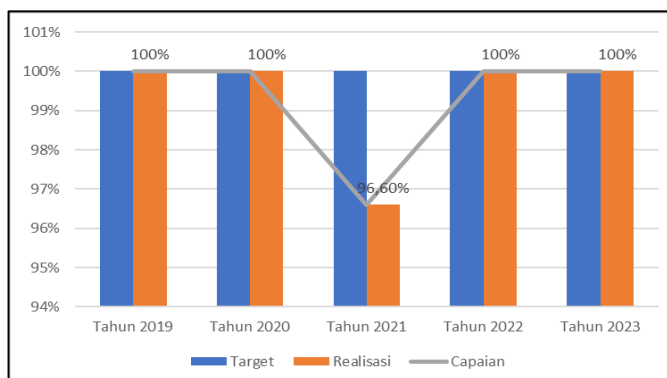
Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu.

Tabel 22. Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Salinan putusan Perkara Pidana Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan putusan Perkara Pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Pidana Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	70	70	0	100%
2	Februari	36	36	0	100%
3	Maret	48	48	0	100%
4	April	36	36	0	100%
5	Mei	72	72	0	100%
6	Juni	62	62	0	100%
7	Juli	78	78	0	100%
8	Agustus	72	72	0	100%
9	September	44	44	0	100%
10	Oktober	79	79	0	100%
11	November	76	76	0	100%
12	Desember	57	57	0	100%
Jumlah		730	730	0	100%

Capaian kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu berturut – turut dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%, 100%, 99,6%, 100% dan 100%. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana agar selalu tepat waktu.

Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023



Tabel 23. Persentase Salinan Putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019-2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2023	730	730	100%	100,0%	100,0%
	2022	753	753	100%	100,0%	100,0%
	2021	717	714	100%	99,6%	99,6%
	2020	676	676	100%	100,0%	100%
	2019	600	600	100%	100,0%	100%

Sasaran 2 - Indikator 3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

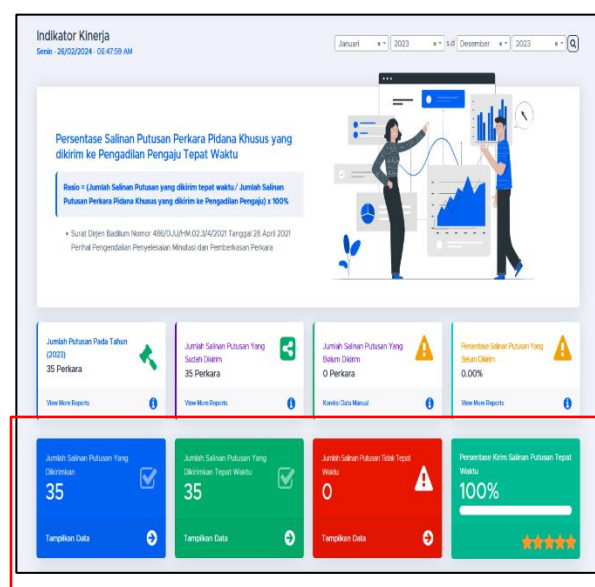
Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus.

Pada tahun 2023, jumlah putusan perkara pidana khusus sebanyak 35 perkara, sebanyak 35 salinan putusan perkara pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Seperti perkara perdata dan perkara pidana, pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus ke pengadilan pengaju juga dilakukan melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari.

Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023 mencapai 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip.

Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju pada tahun 2023.

Gambar 12. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu pada aplikasi Evakip

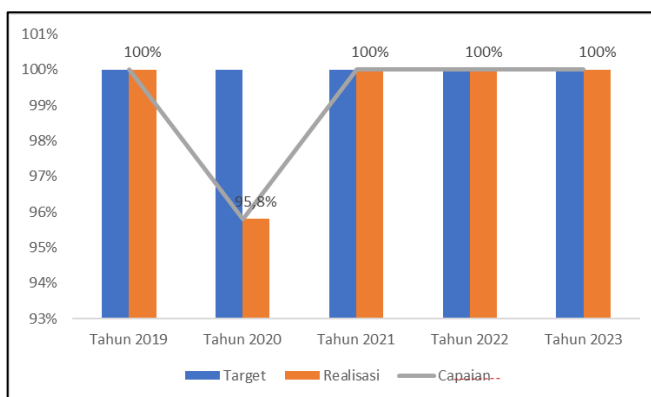


Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	5	5	0	100%
2	Februari	3	3	0	100%
3	Maret	2	2	0	100%
4	April	1	1	0	100%
5	Mei	4	4	0	100%
6	Juni	1	1	0	100%
7	Juli	4	4	0	100%
8	Agustus	4	4	0	100%
9	September	2	2	0	100%
10	Oktober	1	1	0	100%
11	November	2	2	0	100%
12	Desember	6	6	0	100%
Jumlah		35	35	0	100%

Capaian kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%, 95,8%, 100%, 100%, dan 100%. Pada Tahun 2023 capaian kinerja indikator ini sama dengan tahun sebelumnya, kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau mampu mempertahankan kinerja tahun sebelumnya dengan capaian 100%.

Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023



Tabel 25. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 -2023

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2023	35	35	100%	100%	100%
	2022	33	33	100%	100%	100%
	2021	38	38	100%	100%	100%
	2020	24	23	100%	95,8%	95,8%
	2019	25	25	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah sebesar 100%. Faktor pendukung dalam capaian ini adalah:

1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju berdasarkan :

- ✓ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.
- ✓ Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara
- ✓ SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum melalui SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Riau didalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pengiriman salinan putusan
3. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

REALISASI ANGGARAN

1. DIPA (01) BUA

Pada awal tahun 2023, Pengadilan Tinggi Riau memperoleh pagu anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 23.697.968.000,00 (Dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang kemudian pertengahan tahun direvisi dan memperoleh tambahan anggaran menjadi Rp. 25.968.301.000,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah). DIPA (01) BUA adalah anggaran untuk mendukung belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Rincian anggaran DIPA (01) Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.286.214.000,00 (Dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

b. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang sebesar Rp. 4.522.275.000,00 (Empat miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:

- Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 4.434.027.000,00 (Empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah). Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.
- Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 88.248.000,00 (Delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Belanja barang non operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 177.812.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Rincian realisasi anggaran DIPA (01) tahun 2023 dan rincian realisasi anggaran DIPA (01) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Realisasi DIPA 01 Tahun 2023

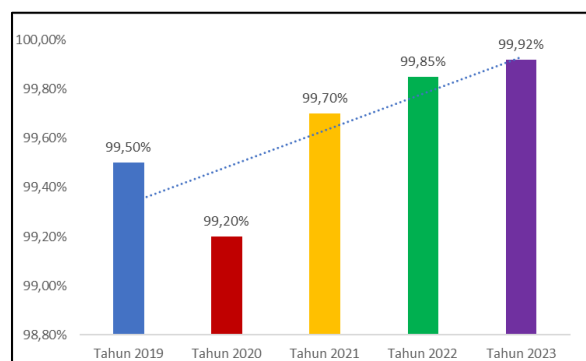
No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 21.286.214.000	Rp 21.266.753.432	99,91%	Rp 19.460.568	0,19%
2.	Belanja Barang	Rp 4.522.275.000	Rp 4.521.985.776	99,99%	Rp 289.224	0,01%
4.	Belanja Modal	Rp 177.812.000	Rp 177.779.700	99,98%	Rp 32.300	0,02%
	Jumlah	Rp 25.968.301.000,00	Rp 25.966.518.908	99,92%	Rp 19.782.092	0,08%

Tabel 27 Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2023	Rp 25.968.301.000,00	Rp 25.966.518.908	99,92%	Rp 19.782.092	0,08%
2.	2022	Rp 24.512.067.000	Rp 24.476.206.678	99,85%	Rp 35.8690.332	0,15%
3.	2021	Rp 24.360.296.000	Rp 24.278.241.068	99,7%	Rp 82.054.932	0,3%
4.	2020	Rp 22.261.062.000	Rp 22.076.214.241	99,2%	Rp 184.847.759	0,8%
5.	2019	Rp 24.097.263.000	Rp 23.970.405.115	99,5%	Rp 126.857.885	0,5%

Berdasarkan data pada grafik, realisasi anggaran DIPA (01) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara berturut-turut adalah 99,5%; 99,2%; 99,7%; 99,85%; dan 99,92%. Data ini menunjukkan realisasi anggaran pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Riau berupaya untuk meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA (01)
Tahun 2019 s.d Tahun 2023



2. DIPA (03) BADILUM

DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah anggaran yang ditujukan untuk menunjang kegiatan teknis peradilan. Pada tahun 2023, Pengadilan Tinggi Riau memperoleh anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 235.514.000,00 (Dua ratus tiga puluh

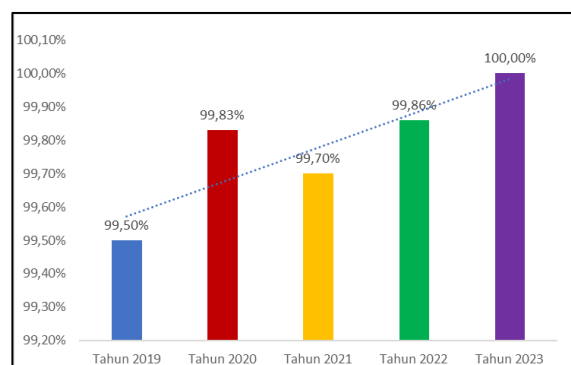
lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi penyerapan DIPA (03) pada tahun 2023 adalah sebesar 99,86% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Realisasi DIPA 03

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Barang	Rp 235.514.000	Rp 235.503.651	100%	Rp 10.349	0%
	Jumlah	Rp 235.514.000	Rp 235.503.651	100%	Rp 10.349	0%

Realisasi anggaran DIPA (03) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai data pada grafik secara berturut-turut adalah sebesar 99,5% ; 99,83% ; 99,7% ; 99,86% ; dan 100%. Kondisi ini menunjukkan untuk mendukung kinerja, Pengadilan Tinggi Riau selalu berusaha meningkatkan realisasi anggaran setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 realisasi anggaran mencapai 100% dan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 9. Realisasi Anggaran DIPA (03)
Tahun 2019 s.d Tahun 2023



DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Tinggi Riau digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan:

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan badan Urusan Administrasi. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut:

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 25.986.301.000,00 dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi DIPA 01 mendukung capaian Sasaran Strategis 1

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 21.286.214.000	Rp 21.266.753.432	99,91%
2	Belanja Barang Operasional	Rp 970.263.000	Rp 970,132,838	99,99%
3	Belanja Non Operasional	Rp 120.800.000	Rp 120.799.723	100,0%
4	Belanja Barang Persediaan	Rp 29.018.000	Rp 29.013.100	100,0%
5	Belanja Jasa	Rp 1.668.352.000	Rp 1.668.350.495	100,0%
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.334.886.000	Rp 1.334.737.332	100,0%
7	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 398.956.000	Rp 398.952.288	99,99%
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 177.812.000	Rp 177.779.700	99,98%
	Jumlah	Rp 25.986.301.000	Rp 25.966.518.908	99,93%

1.2. Kegiatan:

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. kegiatan ini untuk mendukung tercapainya salah satu Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi. Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 177.812.000,00 dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1 – Indikator 5

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal			
	- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 33,148,000	Rp 33,148,000	100%
	- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp 144,664,000	Rp 144,631,700	99.98%
	Jumlah	Rp 177,812,000	Rp 177,779,700	99.98%

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 2 yaitu:

- a. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

- b. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 235.514.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 31. Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang Operasional	Rp 36.370.000	Rp 36.369.500	100%
2	Belanja Barang Persediaan	Rp 70.357.000	Rp 70.356.366	100%
3	Belanja Non Operasional	Rp 33.159.000	Rp 33.157.920	100%
4	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 95.628.000	Rp 95.619.865	99,9%
	Jumlah	Rp 235.514.000	Rp 235.503.651	100%

Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan Perdata menggunakan biaya Proses dari bagian kepaniteraan Perdata. Berikut rincian biaya proses tahun 2023.

Tabel 32. Biaya Proses Tahun 2023 mendukung Sasaran Strategis 2

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	426.000	3.150.000	3.050.000	526.000	0	526.000
2	Februari	Biaya Perkara	526.000	1.950.000	2.070.000	406.000	0	406.000
3	Maret	Biaya Perkara	406.000	1.800.000	1.960.000	246.000	0	246.000
4	April	Biaya Perkara	246.000	2.100.000	1.920.000	426.000	0	426.000
5	Mei	Biaya Perkara	426.000	4.650.000	4.290.000	786.000	0	786.000
6	Juni	Biaya Perkara	786.000	1.650.000	2.090.000	346.000	0	346.000
7	Juli	Biaya Perkara	346.000	1.800.000	1.860.000	286.000	0	286.000
8	Agustus	Biaya Perkara	286.000	1.950.000	1.990.000	246.000	0	246.000
9	September	Biaya Perkara	246.000	2.700.000	2.460.000	486.000	0	486.000
10	Oktober	Biaya Perkara	486.000	2.700.000	2.800.000	386.000	0	386.000
11	November	Biaya Perkara	386.000	2.100.000	2.220.000	266.000	0	266.000
12	Desember	Biaya Perkara	266.000	1.200.000	1.240.000	226.000	0	226.000

Tabel berikut ini menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Riau TA. 2023 sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023.

Tabel 33. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	25,696,316,361	1. Belanja Gaji & Tunjangan PNS	21,286,214,000	21,267,678,754	99.91%
		2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu				2. Belanja Barang Operasional	970,263,000	970,132,838	99.99%
		3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu				3. Belanja Barang Non Operasional	29,018,000	29,013,100	99.98%
		4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				4. Belanja Barang Persediaan	120,800,000	120,799,723	100.00%
						5. Belanja Jasa	1,668,352,000	1,668,350,495	100.00%
						6. Belanja Pemeliharaan	1,334,886,000	1,334,737,332	99.99%
						7. Belanja Perjalanan Dalam Negeri	398,956,000	398,952,288	100.00%
		5. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	177,812,000	1. Belanja Modal Pengadaan alat Pengolah Data dan Komunikasi serta Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	177,812,000	177,779,700	99.98%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	235,514,000	1. Belanja Barang Operasional	36,370,000	36,369,500	100.00%
		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			2. Belanja Barang Persediaan	70,357,000	70,356,366	100.00%
		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu				3. Belanja Non Operasional	33,159,000	33,157,920	100.00%
						4. Belanja Perjalanan Dalam Negeri	95,628,000	95,619,865	99.99%



BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 (lima) indikator pada Sasaran-1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 (tiga) indikator pada Sasaran-2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 101,7%. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 100%, yaitu capaian Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 103,4%, dan capaian Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100%. Capaian Sasaran ke-1 meningkat dari tahun sebelumnya, sedangkan Sasaran ke-2 dapat mempertahankan capaian tahun sebelumnya.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu : anggaran, kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan teknologi informasi sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 25.966.518.908 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) atau 99,92%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 235.503.651 (Dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) atau 100%.

REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparat peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan .
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.

5. Penguatan kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat .
6. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi.
7. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020 -2024**
- 4. LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2023**
- 5. LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 6. LAMPIRAN 6 : CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**
- 7. LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA BERKALA**
- 8. LAMPIRAN 8 : CHECKLIST REVIU**
- 9. LAMPIRAN 9 : SK PENYUSUN LkjIP**
- 10. LAMPIRAN 10: ANALISIS EFISIENSI**

LAMPIRAN 1 :
STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI RIAU



LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan 100%		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \quad 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \quad 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Matrik Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024

NO	TUJUAN		SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
					2020	2021	2022	2023	2024					
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	1. Meningkatkan kepercayaan publik atas pelayanan pengadilan tinggi riau	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%	Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 layanan	120.000.000.000
		93%		2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%					
		97%		3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%					
		44%		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%					
		93%		5. Index persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap <i>layanan</i> Pengadilan	87%	88%	95%	96%	97%				5 layanan	2.000.000.000
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan tingkat banding tepat waktu	5000 perkara	1.800.000.000
		100%		2. Persentase Salinan Putusan Pidana Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

LAMPIRAN 4 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN TINGGI RIAU
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
NO. W4.U/ 336 /OT.01.1/1/2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Pekanbaru, 4 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



MOHAMMAD IDROES

LAMPIRAN 5 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI RIAU



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NOMOR : 4611/KPT.W4-U/RA1.10/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : 4611/KPT.W4-U/RA1.10/X/2023

PENGADILAN TINGGI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%
		2	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 24.592.683.000 |
| 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp. 235.514.000 |

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum


H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Riau


Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	42,50%	106,3%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,15%	102,2%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					103,4%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					101,7%

Pekanbaru, 8 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,


Siswanuriono

LAMPIRAN 7 :
PENGUKURAN KINERJA PERIODE
TRIWULANAN

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	55,25%	138,1%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,11%	102,2%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					109,7%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					104,9%

Pekanbaru, 5 April 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Mohammad Idroes

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	54,63%	136,6%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	97,39%	101,4%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					109,3%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					104,6%

Pekanbaru, 5 Juli 2023

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	47,92%	119,8%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	97,73%	101,8%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					106,0%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					103,0%

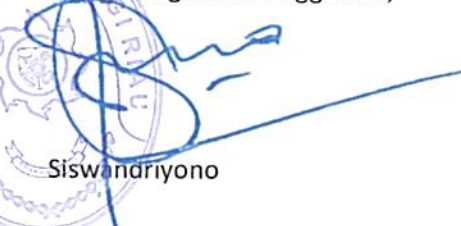


Pekanbaru, 2 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

SISWANDRIYONO

**PENCAPAIAN KINERJA BULAN TRIWULAN IV
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		2 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	96%	100%	104,2%
		3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		4 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	47,45%	118,6%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	96%	98,15%	102,2%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			105,8%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100,0%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			102,9%

Pekanbaru, 8 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,

Siswandriyono

LAMPIRAN 8 :
CHECKLIST REVIU

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerjaIP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi padabadan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √
II	Mekanisme penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit kerjayang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalamLKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dariunit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telahdiyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bukan merupakangabungan unit kerja di bawahnya.	√ √ √ √

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		11. IKU dan IK telah SMART.	√

LAMPIRAN 9 :
SK TIM PENYUSUN LkjIP TAHUN 2023



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 79 /KPT.W4-U/RA1.1/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI RIAU**

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI RIAU
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,



SISWANDIRYONO

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 79 /KPT.W4-U/RA1.1/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
2	Koordinator Validasi Data	Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.
3	Ketua	JON EFFREDDI, S.H., M.H.
4	Sekretaris	R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.
5	Anggota	T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M.
		ROBY HIDAYAT, S.T.
		I.A.N RATNAYANI, S.H., M.H.
		M. JAMALIS, S.H.
		YUSNIDAR, S.H.
		DIYAH FAJAR SARI, S.H, M.H.
		DERSIMA HARAHAHAP, S.E.
		MUHADI, S.E.
		ROMA TUA JUWITA SIHOMBING, S.E.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	ASWIJON, S.H., M.H.
		JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.
		MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.
		BETHARIA OKTAVIANI, S.E.
		YUDI OKTAVIANUS, S.E.
		YUDHI DARMAWAN, S.E.

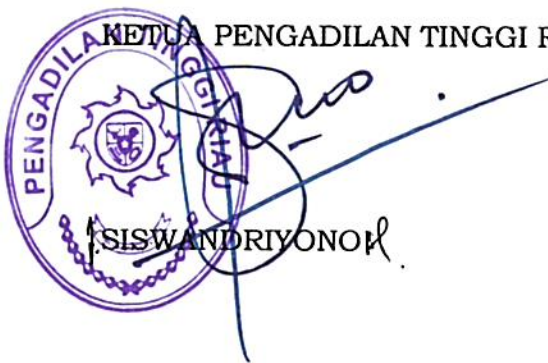
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

SISWANDRIYONO

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 79 /KPT.W4-U/RA1.1/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta Menganalisis Indikator Kinerja pada masing-masing Unit Eselon I
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

SISWANDRIYONO

LAMPIRAN 10 :
ANALISIS EFFISIENSI

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu						
- Perdata	96%	100%	104,2%	187	195	104,2%
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana	96%	100%	104,2%	701	730	104,2%
Persentase perkara Pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana Khusus	100%	100%	100%	35	35	100,0%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	43%	106,3%	384	408	106,3%
Index responden Pengadilan Tk. I yang puas terhadap Layanan Tingkat Banding						
'Index responden Pengadilan Tk. I yang puas terhadap Layanan Tingkat Banding	96%	98,20%	102,3%	96	98	102,3%
Rata-rata capaian kinerja fisik	86%	88%	103,4%	281	293	103,4%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	25.986.301.000	25.966.518.908	99,9%	25.986.301.000	25.966.518.908	99,9%

Kesimpulan

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 103,4%.
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,85%
- Karena capaian kinerja fisik (103%) > realisasi anggaran (99,85%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.

Pekanbaru, 3 Februari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Siswandiyo

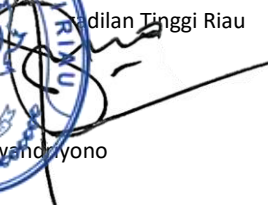
**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS 2
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Perdata	100%	100%	100%	195	195	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Pidana	100%	100%	100%	730	730	100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Pidana Khusus	100%	100%	100%	35	35	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	320	320	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	235.514.000	235.503.651	100%	235.514.000	235.503.651	100%

KESIMPULAN

Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 efektif yaitu sebesar 100%.
Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
Karena capaian kinerja fisik (100%) = realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis 2 dicapai secara Efisien.


 Pekanbaru, 3 Februari 2024
 Kepala Pengadilan Tinggi Riau

 Siswandi Yono